



**Sambutan  
Plt. Kepala Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional**

**Pembukaan Rapat Koordinasi  
Teknis Kemitraan Tahun 2018**

**Jakarta, 12 Februari 2018**

*Assalammu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi

Salam sejahtera bagi kita semua

*Om swastiastu*

Yang saya hormati:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN

3. Para Pemangku Kepentingan Program KKBPk dan Mitra Kerja BKKBN, baik yang berasal dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat
4. Para Pejabat Administrator BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia

Bapak/Ibu yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME. Atas berkat rahmat dan *ridho*-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tahun 2018 ini dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Rakornis Kemitraan Tahun 2018 ini bertema **“Melalui Sinergitas Kegiatan Mitra Kerja Di Kampung KB, Kita Tingkatkan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga”**.

Pada kesempatan yang istimewa ini, atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja BKKBN, atas dukungan komitmen dan peran sertanya dalam pelaksanaan Program KKBPK. Kami sangat menyadari bahwa program nasional ini tidak mungkin dapat hanya dilakukan oleh BKKBN semata, namun kebersamaan dalam mencapai tujuan lebih, melalui kemitraan sangatlah dibutuhkan. Karena itu, BKKBN membutuhkan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi, dan kerja sama dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia.

Para hadirin yang saya banggakan,  
Mengingat saat ini pelaksanaan Program KKBPk begitu penuh tantangan, sehingga diperlukan kemitraan yang sangat kuat, sehingga dapat mendukung sasaran program yang telah ditentukan, maka selaku pimpinan BKKBN, saya harapkan kepada seluruh jajaran di BKKBN agar membuka diri serta saling terbuka dalam menjalin kemitraan.

Sebagai lembaga pemerintah, BKKBN turut berupaya mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2015-2019. BKKBN turut berperan melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) yang diintegrasikan ke dalam Program KKBPk. Untuk

itu, Program KKBPK dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita, terutama Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan Revolusi Mental.

Salah satu bentuk upaya nyata di lapangan yang telah dilakukan untuk mewujudkan ketiga Cita tersebut adalah pembentukan Kampung KB. Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada 14 Januari 2016, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB sampai dengan saat ini, Kampung

KB telah dicanangkan di 7.657 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBP, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Kampung KB, diperlukan dukungan komitmen dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja. Para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, meliputi : organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Seperti Kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang mengalami dan berusaha mengatasi permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti *wasting* (kurus) dan *stunting* (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi, termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa. Sekitar 37 persen (hampir 9 juta) anak balita, mengalami *stunting* (Rikesdas 2013) dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* ke 5 (lima) terbesar di dunia. Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh keluarga yang miskin dan kurang mampu, akan tetapi *stunting* juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Karena itu kami melalui program KKBPk di Kampung KB, berupaya meningkatkan sinergitas

kegiatan bersama mitra kerja untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bapak/Ibu yang berbahagia,  
Kemitraan dengan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang dibangun BKKBN diwadahi dalam Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Berdasarkan data BKKBN tahun 2018, terdapat sebanyak 118 Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan/Mitra Kerja, ini adalah jumlah yang sangat besar. Sekaitan dengan itu, efektivitas implementasi MoU tersebut, perlu kita evaluasi bersama. Untuk itu, saya berharap, melalui Rakornis Kemitraan ini, Saudara-saudara yang hadir akan dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan MoU secara konkret, termasuk hambatan dan keberhasilannya. Hal ini penting karena kerja nyata dan karya nyata



sangat dibutuhkan untuk keberhasilan Program KKBPK. Jangan sampai kemitraan yang dijalin antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja terhenti pada penandatanganan MoU.

Bapak/Ibu yang saya banggakan,  
Rakornis Kemitraan diselenggarakan untuk memberikan penekanan kepada peningkatan peran Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK. Karena itu, Rakornis Kemitraan Tahun 2018 bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK pada umumnya, khususnya di Kampung KB dan daerah legok, serta menyusun rencana tindak lanjutnya.

Tujuan penyelenggaraan Rakornis Kemitraan Tahun 2018 ini sejalan dengan upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sasaran-sasaran tersebut diantaranya menurunkan angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) dari 61,9 persen menjadi 66,0 persen, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (*unmet need*) dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen pada tahun 2019. Tentunya, untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK ke depan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan bahwa hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 menunjukkan bahwa angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,4 yang berarti bahwa seorang wanita di Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama masa reproduksinya. Angka TFR hasil SDKI tahun 2017 ini menurun dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012 yaitu sebesar 2,6 anak per wanita. Angka Fertilitas menurut kelompok (ASFR) umur 15-19 tahun juga mengalami penurunan dari 48 kelahiran per 1000 wanita pada hasil SDKI tahun 2012 menjadi 36 kelahiran per 1000 wanita pada hasil SDKI tahun 2017. Penurunan TFR ini juga diikuti oleh kenaikan angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dari 61,9 persen pada SDKI 2012 menjadi 63,6 persen pada SDKI 2017.

Indikator lain hasil SDKI tahun 2017 adalah *unmet need* KB yang menggambarkan wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi, namun menginginkan penundaan kehamilan atau berhenti sama sekali. *Unmet need* KB hasil SDKI tahun 2017 sebesar 10,6 persen dibandingkan hasil SDKI tahun 2012 sebesar 11,4 persen. Selain itu, median umur kawin pertama wanita, pernah kawin umur 25-49 tahun, mengalami peningkatan dari 20,1 tahun pada hasil SDKI tahun 2012, menjadi 21,6 tahun pada hasil SDKI tahun 2017.

Tentunya kita tidak ingin mengulang hasil yang ditunjukkan dua SDKI terdahulu (2007 dan 2012), yaitu angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) di Indonesia, yang tertahan pada angka 2,6 anak per wanita sejak SDKI 2002-2003. Sekaitan dengan itu, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memperkuat koordinasi operasional dan memberikan fokus perhatian terhadap Program KKBPK di wilayah kerja masing-masing. Hal ini termasuk dukungan dan

perhatian terhadap pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB pasca persalinan.

Bapak/Ibu dan hadirin yang kami hormati,  
Kami informasikan bahwa BKKBN telah ditetapkan sebagai instansi pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 393/K.1/PDP.09/2016, tanggal 8 Desember 2016. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pusdiklat KKB BKKBN mempunyai kewenangan mengakreditasi Lembaga Diklat KKB, dalam hal penyelenggaraan teknis dan fungsional di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada tahun 2017 Pusdiklat KKB BKKBN telah melaksanakan proses akreditasi bagi Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana DKI Jakarta serta 32 Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi.

Sebagai hasil dari proses ini, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada 13 Lembaga Diklat yang telah terakreditasi meliputi Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau dan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana DKI Jakarta.

Bapak/ibu yang kami banggakan  
Seperti kita ketahui bahwa Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan komposit hasil agregasi 3 (tiga) jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yaitu : indeks kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Banyak tantangan terjadi dalam IPM karena tingginya kesenjangan capaian pembangunan manusia antar wilayah, baik antar provinsi

maupun antar kabupaten dan kota dalam lingkup provinsi. Hal ini tercermin dari tingginya variasi skor IPM antar wilayah. Karena itu pemerataan pembangunan antar wilayah maupun kelompok masyarakat, adalah merupakan kata kunci bagi Indonesia. Tanpa pemerataan capaian pembangunan manusia akan sulit dibangun, bahkan akan berdampak pada lanjutan konflik sosial yang sangat rentan terjadi, jadi 3 (tiga) dimensi IPM harus memperoleh perhatian yang sama besarnya, sama pentingnya, sebagai indikator untuk mengukur dan menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah, masyarakat/penduduk. Berdasarkan laporan dari *UNDP* dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014. Karenanya bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis, selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan untuk penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

Bapak/Ibu dan hadirin yang berbahagia,  
Mengakhiri sambutan ini, melalui Rakornis Kemitraan, saya berharap, agar segenap Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang hadir saat ini, dapat menghasilkan rencana tindak lanjut bersama dalam implementasi Program KKBPK di lapangan. Hal ini demi tercapainya sasaran Program KKBPK Tahun 2018, sehingga akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019. Sekaitan dengan itu, saya instruksikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, agar melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program KKBPK yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) untuk menjabarkan secara rinci rencana tindak lanjut sampai tingkat lini lapangan. Akhirnya, dengan mengucapkan *bismillaahir rahmaanir rahiim*, Rakornis Kemitraan Tahun 2018 ini, saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa melimpahkan



rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam  
menyukseskan Program KKBPk demi  
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri,  
dan berkepribadian.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum wr. wb.*

*Om santi santi santi om*

Jakarta, 12 Februari 2018

Plt. Kepala BKKBN,

**dr. SIGIT PRIOHUTOMO, MPH.**